

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan pendidikan, tentunya juga diperlukan biaya. Besaran biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat/orang tua siswa tergantung dari kebijakan tempat anaknya mengenyam pendidikan.

Salah satu jenjang pendidikan yang ada di Indonesia adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam *context* lingkungan global, tantangan akan peran pendidikan di SMA Indonesia menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan visinya sebagai proses “*Character Building*”. Pendidikan pada jenjang SMA harus mampu meningkatkan kualitasnya, sehingga memiliki keunggulan daya saing (*Competitive Advantage*) yang tinggi. SMA sebagai lembaga pendidikan formal, merupakan ujung tombak dan paling menentukan dalam menciptakan suatu generasi yang mampu menghadapi tantangan global yang terjadi saat ini. Beberapa indikator esensial yang sangat menentukan kualitas sekolah sebagai input antara lain: siswa, kurikulum, sarana prasarana, biaya, pengelolaan dan lingkungan.

Bagi suatu unit pendidikan, biaya pendidikan merupakan salah satu instrument input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Menurut

Supriyadi (2003), hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya pendidikan proses pendidikan tidak akan dapat berjalan.

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Konstitusi amandemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD selain gaji guru agar mutu dan pemerataan pendidikan dapat lebih ditingkatkan. Upaya peningkatan mutu dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah memerlukan adanya standar nasional bidang pendidikan. Untuk itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (SNP) yang memberikan pengaturan standar nasional pendidikan sekaligus merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara SMA Negeri 2 Mengwi, Bapak I Ketut Redika, pada tanggal 1 November 2022, jam 09.00-10.00 WITA bertempat di Kantor Tata Usaha maka diketahui bahwa sumber dana pengelolaan biaya pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi adalah APBD, APBN dan Dana Partisipasi Masyarakat (KOMITE) yang memang boleh dibebankan kepada orang tua (masyarakat) berdasarkan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Lebih rinci pada Pasal 2 (1) disebutkan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pasal 2 (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Bapak Ketut Redika juga menyebutkan bahwa Sekolah cenderung berupaya agar pembiayaan pendidikan di Sekolah dapat memenuhi delapan standar nasional pendidikan. Dalam prosesnya kegiatan-kegiatan sekolah yang terselenggara dari masing masing standar membutuhkan biaya. Pendanaan Pendidikan merupakan tanggung jawab Bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Sehingga apabila Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masing masing mengalokasikan dana 20% sesuai dengan amandemen UUD 1945,

dan ada Dana Partisipasi Masyarakat maka biaya pendidikan bisa *tercover* dengan baik.

Namun dalam kenyataannya tidak demikian, Pada tanggal 8 Mei 2020 terbit Surat Edaran dari Sekda Provinsi Bali Nomor: 10470 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa setelah rasionalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 terkait dengan pandemi covid-19 di lingkungan pemerintah provinsi Bali Tahun 2020 yang menyatakan bahwa sampai saat ini anggaran APBD untuk seluruh SMA di Provinsi Bali termasuk SMA Negeri 2 Mengwi dirasionalisasi . Sedangkan SMA Negeri 2 Mengwi memiliki masalah utama dalam pembiayaan adalah (1) Tidak tersedianya Lahan Parkir yang memadai untuk menampung kendaraan siswa sehingga harus menyewa lahan parkir yang berada di sebelah barat Sekolah. Lokasi Sekolah yang berada di kawasan pariwisata menyebabkan harga tanah mahal sehingga sewa lahan pun mahal. Hal ini menyebabkan pembengkakan biaya sewa yang harus dikeluarkan oleh Sekolah. (2) Banyaknya kegiatan yang direncanakan dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) yang seharusnya dapat dibiayai menggunakan dana APBD, pada akhirnya harus dibiayai dengan memaksimalkan Partisipasi Masyarakat. Dengan dihapusnya dana APBD maka pembiayaan pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi bergantung hanya pada dana APBN dan Dana partisipasi masyarakat (Dana Komite). Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan biaya pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi setelah rasionalisasi APBD Maka perlu adanya penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi tentang pengelolaan biaya pendidikan di SMAN 2 Mengwi sehingga nantinya SMAN 2 Mengwi dapat

mengetahui efektivitas dari pengelolaan biaya yang sudah dilakukan. Dari efektivitas tersebut nantinya akan dapat diambil kebijakan yang tepat guna untuk meningkatkan pengelolaan biaya pendidikan, sehingga pengelolaan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pendidikan di sekolah.

Penelitian evaluasi tentang pengelolaan biaya pendidikan ini sangat penting untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sholihat (2017), yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan biaya pendidikan perlu dilakukan evaluasi, sehingga nantinya akan dapat meminimalkan kendala yang terjadi pada pengelolaan biaya pendidikan tersebut. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Darmana, (2021), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa evaluasi program sangat penting untuk dilakukan untuk memaksimalkan program yang telah dilaksanakan pada sebuah instansi. Selanjutnya Sutrisnawati, (2021) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa evaluasi model CIPP mampu mengungkap efektivitas dari pelaksanaan penggunaan bantuan operasional sekolah daerah tahun anggaran 2020, sehingga hasil evaluasi ini nantinya akan dapat mengatasi tantangan dalam pelaksanaan yang nantinya akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada penelitian ini penulis mencoba melakukan evaluasi terhadap pengelolaan biaya pendidikan di SMA Negeri 2 Mengwi. Evaluasi adalah proses kegiatan mengukur dan menilai (Agung, 2016). Implementasi program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan

tidak akan dapat dilihat efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan- kebijakan baru sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data. Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (*decision maker*) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program.

Evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah evaluasi model CIPP. Menurut Stufflebeam, Daniel L. dan Zhang, (2017), model evaluasi CIPP adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk memberikan bantuan kepada administrator atau *leader* pengambil keputusan. Hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan. Maka dari itu, pada penelitian ini akan mengambil judul tentang **Studi Evaluasi Pengelolaan Biaya Pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) SMA Negeri 2 Mengwi belum memiliki lahan parkir yang memadai sehingga harus menyewa lahan parkir yang memerlukan biaya sebesar Rp. 63.000.000 juta per tahun sementara dana ini tidak bisa dibayarkan menggunakan Dana APBN maupun APBD.
- 2) SMA Negeri 2 Mengwi merencanakan kegiatan kegiatan yang tidak tercover dari dana APBN, karena dana tersebut sudah teralokasikan sejumlah pagu yang disediakan, sehingga ada beberapa kegiatan seperti: Ulang Tahun

Sekolah, Kegiatan Lomba Sekolah, Kegiatan Waktu Senggang (PWS), jasa pelayanan Ijazah Siswa dibiayai dari Dana Partisipasi Masyarakat.

- 3) SMA Negeri 2 Mengwi belum mengetahui efektivitas pengelolaan biaya pendidikan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu setelah turunnya surat edaran Sekda Nomor: 10470 Tahun 2020.

1.3 Pembatasan Masalah

Mencermati permasalahan yang muncul begitu kompleks khususnya yang menyangkut manajemen pembiayaan pendidikan, maka penelitian ini berfokus pada Studi Evaluatif Pengelolaan Biaya Pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi dengan menggunakan pendekatan model *CIPP*. Masing – masing komponen akan diberikan Batasan. Komponen *Context* dibatasi pada ketersediaan landasan hukum, visi misi, dan sistem manajemen pengelolaan biaya pendidikan. Komponen Input dibatasi pada ketersediaan dan kompetensi petugas, dokumen, sarana prasarana, koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan biaya pendidikan. Komponen Proses dibatasi pada teknis penyusunan, perencanaan, pencairan, pembagian tugas pengelolaan dan pelaporan pengelolaan biaya pendidikan. Sedangkan Komponen Produk dibatasi pada ketersediaan sarana prasarana proses pembelajaran, pemenuhan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemenuhan biaya pembelajaran.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana efektivitas pengelolaan biaya pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi ditinjau dari dimensi *context*?
- 2) Bagaimana efektivitas pengelolaan biaya pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi ditinjau dari dimensi input?
- 3) Bagaimana efektivitas pengelolaan biaya pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi ditinjau dari dimensi proses?
- 4) Bagaimana efektivitas pengelolaan biaya pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi ditinjau dari dimensi produk?
- 5) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan biaya pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi?

1.5 Tujuan Penelitian

Rumusan tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan biaya pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi ditinjau dari dimensi *context*.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan biaya pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi ditinjau dari dimensi input.
- 3) Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan biaya pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi ditinjau dari dimensi proses.

- 4) Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan biaya pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi ditinjau dari dimensi produk.
- 5) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan biaya pendidikan SMA Negeri 2 Mengwi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni: manfaat teoretis dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pengelolaan biaya pendidikan khususnya di SMA Negeri 2 Mengwi.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Kepada Kepala SMA Negeri 2 Mengwi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi Kepala SMA Negeri 2 Mengwi dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) melalui pemetaan biaya anggaran pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan.

2) Kepada Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi peneliti lain dalam melaksanakan penelitian-penelitian terutama pada bidang evaluasi pendidikan.

1.7 Rencana Publikasi

Luaran dari penelitian ini adalah artikel yang akan dipublikasi di Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia Undiksha.

